

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini hendak mengkaji berkenaan dengan perilaku memilih masyarakat dalam konteks pemilihan kepala daerah, lebih spesifik lagi meneliti tentang “Studi Deskriptif: Tingkat Figuritas Tokoh Tri Rismaharini dan Pemahaman Pemilih akan Kapabilitas Pasangan Eri-Armuji (Preferensi Politik Pemilih Pasangan Eri-Armuji Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020)”.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, istilah demokrasi sangat dekat di masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana penerapan sistem ini dilandaskan oleh kesetaraan hak masyarakat, sehingga pemerintah hendaknya menjalankan kekuasaannya didasari pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah juga diawasi oleh rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan terdapat banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses pengawasannya.

Demokrasi menurut pengertian Henry B. Mayo menyebutkan bahwa sistem politik demokratis diartikan sebagai sebuah sistem yang dimana kebijakan-kebijakan publik didasarkan pada suara mayoritas dari wakil-wakil yang juga diawasi oleh rakyat dalam pemilihan yang dilakukan secara periodik, hal ini merujuk pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam kondisi yang menjamin adanya kebebasan politik (Budiarjo, 2008).

Demokrasi menurut Joseph Schumpeter diartikan sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin politik, dengan sasaran warga negara akan diberikan kesempatan untuk menentukan satu pilihan diantara pemimpin politik yang sedang mengikuti kontestasi atau sedang bersaing untuk memperoleh suara (Zaman, 2016).

Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi perwakilan memiliki konsekuensi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara periodik. Salah satu unsur demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang demokratis.

Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih anggota serta partai politik, masyarakat mengenalinya dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin pemerintahannya. Terdapat pula pemilihan umum dalam konteks otonomi daerah yang tujuannya untuk memilih kepala pemerintahan daerah atau yang dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara prinsip dapat dikatakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu sarana yang harus diterapkan dalam konteks demokrasi perwakilan untuk merubah suara rakyat menjadi posisi atau kursi di pemerintahan yang nantinya akan menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam konsep pendekatan demokrasi minimalis, dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemilihan umum adalah adanya partisipasi rakyat, yang mana harapannya masyarakat dapat terlibat aktif didalamnya, dalam hal ini menentukan pilihannya, agar nantinya demokrasi yang diharapkan bisa dijalankan dengan baik. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada konteks negara yang menganut sistem demokrasi dinilai sebagai simbol dan juga sebagai standar atau tolok ukur demokrasi, bahwa dengan adanya keterbukaan dan kebebasan berserikat digambarkan sebagai kondisi yang agak akurat terkait dengan partisipasi dan aspirasi masyarakat, partisipasi politik masyarakat menjadi sebuah keharusan atau syarat dalam demokrasi, dalam hal ini disebut menjadi perangkat yang penting, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang paling mengerti dan memahami apa yang mereka kehendaki (Budiarjo, 1982).

Semakin tinggi, semakin aktif partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan hak suaranya dalam kontestasi politik yang ada, turut menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah maka hal ini juga dinilai semakin mendekatkan pada pencapaian asas kedaulatan rakyat yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri.

Melalui pemilihan umum yang diselenggarakan artinya warga diberikan ruang untuk memilih keterwakilannya atau dalam hal ini pemimpin guna memperjuangkan aspirasi atau kehendak masyarakat, dalam prosesnya tentu akan banyak faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak suaranya

dalam konteks pemilihan umum yang sedang diselenggarakan baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Pada konteks penelitian kali ini merujuk pada pemilihan kepala daerah.

Tahun 2020 menjadi salah satu tahun penyelenggaraan pemilihan umum atau kontestasi politik di Indonesia yaitu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak oleh 270 daerah dan salah satunya adalah Kota Surabaya. Pada periode sebelumnya Surabaya dipimpin oleh Tri Rismaharini (Risma) yang menjabat selama dua periode sebagai Walikota Surabaya. Sosok Risma sebagai Walikota Surabaya dinilai berhasil dalam memimpin kota Surabaya selama dalam kurun waktu 2010-2015 pada periode pertama dan periode kedua tahun 2015-2020.

Risma sangat begitu populer di masyarakat, tidak hanya di Kota Surabaya saja, melainkan sosok Risma dikenal hingga skala nasional dan internasional karena berbagai prestasi dan penghargaan yang telah dihasilkan. Masyarakat Surabaya sangat menyukai kinerja dan kepemimpinan Risma karena memang dinilai sebagai sosok yang luar biasa dalam memimpin Surabaya, banyak prestasi yang dihasilkan mulai dari penyediaan *public space* seperti taman yang disertai tempat bermain, yang juga menjadikan Surabaya semakin rindang dan sejuk. Risma juga sering mengatasi permasalahan Surabaya dengan turun langsung, dengan gaya kepemimpinan yang bagi sebagian orang terlihat berbeda yaitu terlibat langsung, seperti saat terjadi kemacetan, Risma turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas ataupun saat banjir yaitu ikut membersihkan kotoran atau sampah yang menggenang, beberapa hal tersebut tentu menarik perhatian masyarakat Surabaya.

Prestasi lainnya yang juga begitu luar biasanya adalah ketika Risma mengeluarkan kebijakan penutupan lokalisasi Dolly yang sebetulnya juga mendapatkan banyak pertentangan di masyarakat, Risma rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk hal tersebut, karena dalam prosesnya juga tidak sedikit pihak Pemerintah Kota Surabaya yang kontra dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prestasi Risma dalam memimpin kota Surabaya, seperti adanya perbaikan jalan, jembatan, dan juga saluran air.

Hal tersebut merupakan beberapa gambaran tentang kinerja kongkrit Risma ketika memimpin kota Surabaya yang akhirnya membuat banyak masyarakat mengagumi kepemimpinan beliau, buktinya sebagian besar masyarakat Surabaya memang puas dengan kinerja Risma seperti yang terbukti dalam sebuah survei oleh Ali Sahab (2017) yang menunjukkan bahwa jika dievaluasi di tingkat masyarakat umum (massa) dan kalangan elit atau *opinion leaders*, menunjukkan bahwa sebanyak 85,70% dari kalangan masyarakat umum menyatakan puas dengan kinerja Risma, sedangkan dari kalangan elit menunjukkan persentase sebesar 68,90% yang menyatakan puas dengan kinerja Risma dan kemudian sebanyak 14,3% dari kalangan masyarakat umum menyatakan kurang puas dengan kinerja Risma, sedangkan dari kalangan elit menunjukkan persentase sebesar 31,10% yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Risma, betul bahwa memang belum seluruh masyarakat Surabaya menyatakan puas dengan kinerja Risma. Tentu masih ada hal-hal yang terus harus diperbaiki dalam pembangunan Kota Surabaya dan juga dalam kepemimpinan yang beliau lakukan, namun angka tersebut juga tidaklah kecil, semakin menunjukkan bahwa memang Risma sangat populer dan dinilai cukup berhasil dalam menjalankan kerjanya sebagai Walikota Surabaya.

Proses perjuangan Risma dalam membangun Kota Surabaya ini sedikit banyak juga diliput dan disampaikan oleh media massa, hal tersebut tentu memberikan efek akan terbentuknya nilai (citra) politik Risma. Walter Lipman (1965) menjelaskan citra sebagai *picture in our head*. Citra dipahami sebagai sebuah gambaran yang dimiliki individu mengenai realitas tertentu yang pada kenyataannya bisa jadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ketika media massa gencar dan intens memberikan informasi terkait kinerja ataupun gaya kepemimpinan Risma dan diterima oleh masyarakat maka secara tidak langsung akan membentuk citra tersendiri di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surabaya.

Citra politik yang terbentuk di benak masyarakat tentang sosok Risma kemudian juga bisa mempengaruhi opini publik, opini publik yang ada bisa terbentuk melalui interaksi yang terjadi di masyarakat dan adanya informasi yang

terus dipaparkan lewat berbagai media yang ada. Hal tersebut kemudian akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku politik seseorang, hal ini dikarenakan citra politik ini juga berkaitan dengan pendapat umum yang ada dan kemudian akan mempengaruhi masyarakat akan persepsi terhadap seseorang dan kemudian akan memberikan pengaruh dalam perilaku politiknya (Arifin, 2003).

Konteks pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya terdapat dua calon yang akan bertanding, meskipun jauh-jauh hari sebelum itu juga sudah banyak nama yang muncul seperti di baliho yang ada di jalan-jalan sebagai kemungkinan bakal calon wali kota atau calon wakil wali kota. Pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menerima pendaftaran dua bakal pasangan calon dalam Pilwali Surabaya 2020 terhitung sejak hari pertama pendaftaran yaitu tanggal 4 September 2020 hingga hari terakhir yaitu tanggal 6 September 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menetapkan dua pasangan calon yaitu Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota nomor urut 1 dan Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota nomor urut 2 pada Rabu, 23 September 2020.

Dilihat dari jadwal resmi KPU, masa kampanye akan terjadi pada 26 September sampai dengan 5 Desember, yang kemudian akan ada masa tenang pada 6 Desember sampai dengan 8 Desember, hingga selanjutnya waktu pencoblosan pada 9 Desember. Terdapat peraturan pelaksanaan kampanye yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mana tentu ini menjadi pijakan bagi pasangan calon untuk membuat dan menjalankan strategi kampanye nya yang sesuai dengan peraturan yang ada karena pemilihan umum kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan ada pandemi COVID-19 yang membuat segala hal yang berkenaan dengan pemilihan umum tidak bisa diselenggarakan seperti sedia kala, harus menaati aturan yang sudah ditetapkan dan protokol kesehatan yang berlaku demi kebaikan bersama.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kota Surabaya ini tentu memiliki tantangan tersendiri, bahwa bukan hal yang mudah untuk menarik pemilih agar bisa menggunakan hak suaranya, khususnya pada konteks adanya pandemi

COVID-19 yang pada akhirnya tiap calon pun harus memiliki strategi pemasaran politik yang tepat agar bisa menarik pemilih untuk menggunakan hak suaranya, termasuk dalam menyasar pemilih yang memang memiliki kekaguman yang luar biasa pada Walikota Surabaya sebelumnya yaitu Tri Rismaharini karena sosok Risma sudah begitu melekat di benak masyarakat Kota Surabaya.

Dalam hal ini peneliti hendak menyoroti pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 yaitu Eri Cahyadi dan Armuji yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai politik lainnya yang mendukung pencalonannya yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Perindo.

Peneliti memandang bahwa pasangan calon ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan mereka merupakan calon yang diusung oleh PDIP yang merupakan partai yang mengusung Wali Kota Surabaya yang sudah menjabat selama dua periode yaitu Tri Rismaharini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Risma memiliki kinerja yang bagus dalam memimpin Kota Surabaya selama masa jabatannya dan berefek pada citra politik yang terbentuk dan menjadi opini publik bagi masyarakat, dan hal tersebut bisa mempengaruhi pilihan politik tiap individu, yang dalam konteks ini bukan kepada Risma lagi namun kepada sosok calon pemimpin Kota Surabaya selanjutnya yang berasal dari partai yang sama, karena memang strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh tim dari Eri-Armuji juga mengarahkan pada kekuatan Risma, sehingga hal ini menjadi pertanyaan dan fenomena yang menarik untuk diteliti apakah memang efek figuritas dari Risma ini menjadi salah satu alasan pemilih dalam menjatuhkan hak suaranya terhadap pasangan Eri-Armuji atau justru ada faktor lain yang lebih mendominasi.

Pasangan Eri dan Armuji terlihat memperoleh banyak dukungan dari publik. Penulis menyoroti akan tagar dan *tagline* yang mereka usung yaitu #meneruskankebaikan, #EripenerusRisma, itu artinya yang ingin mereka tunjukkan, yang ingin mereka angkat adalah pasangan calon ini hendak meneruskan perjuangan Wali Kota Surabaya periode sebelumnya yaitu Tri Rismaharini yang

sudah terbukti sukses dalam memimpin kota Surabaya, bahkan Eri Cahyadi sendiri yang mengatakan bahwa dirinya dengan Armuji akan melanjutkan, menjaga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Risma. Sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau akan menjadi visi dan program kami kedepan, hal tersebut dikatakan ketika Eri mendaftarkan dirinya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Jadi secara prinsip yang dijanjikan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji ini adalah salah satunya dengan meneruskan apa saja yang telah dilakukan Risma. Dilansir dari website KPU, Visi dari pasangan Eri Cahyadi dan Armuji adalah “Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan” dengan *tagline* “Kerja Meneruskan Kemajuan”, artinya ini yang menjadi produk politik yang hendak ditawarkan kepada pemilih, bukan suatu program yang orisinal, melainkan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya.

Tentu hal tersebut ada yang menanggapi dengan positif dan ada yang menanggapi negatif, dalam arti orang-orang yang sebelumnya memilih Tri Rismaharini dan sangat kagum dengan kinerjanya tentu berharap bahwa orang yang juga dikenal Risma dan didukung oleh Risma benar-benar bisa menjadi sosok yang melanjutkan perjuangan Risma dalam memimpin Kota Surabaya, namun tentu juga banyak pula yang menilai bahwa Eri Cahyadi dan Armuji tidak memiliki gagasan sendiri, tidak kreatif karena hanya mendulang kinerja Tri Rismaharini saja.

Dilansir dari Liputan6.com (2020), pengamat politik dari *Accurate Research and Consulting* (ARC) Indonesia, Baihaki Siradj menjelaskan bahwa dirinya menilai Tri Rismaharini (Risma) masih memiliki efek elektoral bagi kemenangan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) Eri Cahyadi-Armuji. Lebih lanjut lagi Baihaki menjelaskan, efek elektoral yang ia maksud muncul lantaran selama ini Eri dipersepsikan sebagai calon Wali Kota yang dipersiapkan Risma untuk mengganti dirinya dalam memimpin Kota Surabaya lima tahun ke depan. Eri dinilai dapat menggaet suara dari pemilih yang merupakan pendukung fanatik Risma, terlebih lagi Eri juga memiliki pengalaman sebagai birokrat dan dengan usianya masih dapat digolongkan mewakili kalangan

anak muda. Sedangkan Armuji juga dinilai sudah berpengalaman karena merupakan politikus senior PDIP, juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, dan sekarang anggota DPRD Jawa Timur.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pemilih tentu juga akan dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor dari modal pasangan Eri-Armuji, bahwa Eri-Armuji hendak menunjukkan bahwa mereka juga memiliki modal atau kapasitas yang mumpuni sehingga dapat membangun Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi.

Dilansir dari Detik.com (2020) dalam Debat Perdana Pilwali Surabaya 2020, dijelaskan bahwa Eri-Armuji memang punya visi lanjutkan perjuangan Risma bangun Surabaya, dalam debat yang bertemakan 'Menjawab Permasalahan dan Tantangan Kota Surabaya di Era Pandemi COVID-19' ini, Eri-Armuji memiliki visi untuk menjadikan Surabaya, kota yang mendunia dan bangkit di masa sulit pandemi COVID-19. "Kami Eri-Armuji berjanji akan membawa kota ini selama melewati masa sulit di masa pandemi ini dan menjadi kota yang bangkit menjadi kota dunia yang unggul manusiawi berkelanjutan inilah visi kami," kata Eri. Dijelaskan pula bahwa mereka akan menggunakan APBD untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan iklim investasi dan partisipasi semua lapisan masyarakat di Kota Surabaya, kemudian juga kembali menekankan bahwa Eri berjanji bahwa akan membangun kota dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bahwa dirinya berkeinginan Surabaya menjadi tempat kondusif untuk berbagai usaha dan mengekspresikan diri. Seperti yang sudah disebutkan bahwa mereka memang berjanji akan melanjutkan perjuangan Risma membangun Surabaya. Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tri Rismaharini, Eri mengatakan "Secara khusus kami berterima kasih kepada Ibu Risma yang telah membuat kota Surabaya menjadi kota yang diakui dunia dengan kualitas birokrasi yang terbaik di mana rakyat bisa menempuh pendidikan dan kesehatan secara gratis".

Oleh karena itu memang inti atau *value* dan produk politik serta strategi pemasaran politik yang menjadi penekanan pasangan calon nomor urut 1 ini adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan perjuangan Risma dalam membangun kota

Surabaya, yang pada akhirnya sangat dimungkinkan pemilih bisa terpengaruh oleh faktor atau efek elektoral dari Risma kepada pasangan calon nomor urut 1 ini, bahwa figuritas Risma atau citra politik Risma yang selama ini ditangkap oleh masyarakat Kota Surabaya ini kemungkinan besar akan mempengaruhi mereka dalam konteks Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 khususnya terhadap pasangan calon nomor urut 1 yaitu Eri dan Armuji yang merupakan calon yang diusung oleh PDIP tahun ini dan calon yang diberi dukungan secara penuh oleh Tri Rismaharini.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Warsono (2022) disebutkan bahwa untuk memenangkan Pilkada Surabaya Tahun 2020, tim sukses atau tim pemenangan dari Eri-Armuji menggunakan beberapa strategi, terdiri dari strategi ofensif (menyerang) dan defensif (bertahan). Strategi ofensifnya adalah pesan politik (tagar meneruskan kebaikan Risma), kampanye langsung, pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga memanfaatkan jaringan yang ada, dan penggunaan isu politik. Kemudian strategi defensifnya adalah memanfaatkan dukungan Risma sebagai *political branding*, dukungan langsung dari PDIP, pemberian surat cinta yang bertanda tangan Risma, Dapat diketahui bahwa salah satu strategi pemenangannya adalah memanfaatkan dukungan dari Risma ini yang kemudian juga akan menjadi salah satu variabel dari penelitian kali ini.

Terlebih lagi dari hasil pemungutan suara yang telah diselenggarakan, dilansir dari CNNIndonesia.com (2020), menyebutkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyatakan pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji, menang dalam Pilkada Surabaya 2020. Dalam Keputusan KPU Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 yang dibacakan, pasangan Eri-Armuji unggul dengan memperoleh 597.540 suara, sedangkan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 451.794 suara. Tentu hal ini menjadi perhatian dan pertanyaan bagi peneliti, bahwa fenomena terpilihnya Eri-Armuji sangat menarik untuk diteliti, ditelusuri, dan dianalisis lebih lanjut, apakah memang kemenangan Eri-Armuji dipengaruhi dari faktor figuritas “Risma” atau justru

pemilih juga memiliki alasan lain yakni modal atau kapasitas dari pasangan Eri-Armuji, jika kedua hal tersebut menjadi alasan maka peneliti juga hendak menunjukkan seberapa tinggi atau rendah tingkatannya.

Proses pendalaman untuk mengkaji lebih lanjut preferensi politik dari pemilih pasangan Eri-Armuji dapat dilihat dengan teori perilaku memilih (*voter behavior*). Perilaku memilih menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam serta merupakan pendekatan yang relevan pada penelitian kali ini, bagaimana keputusan dari seorang pemilih yang menggunakan hak suaranya memiliki alasan tersendiri.

Beberapa faktor akan mempengaruhi keputusan pemilih, mulai dari latar belakang pemilih, entah itu dari pekerjaannya, pendidikan, atau latar belakang sosiologis lainnya, kemudian juga bisa dipengaruhi dari sisi psikologis pemilih, apakah ada ikatan emosional terhadap calon kandidat, bagaimana sikap pemilih, atau bahkan juga proses keputusan pemilih sudah dipikirkan dan dipertimbangkan jauh-jauh hari, termasuk dalam kasus kemenangan Eri-Armuji ini, sehingga nantinya akan diketahui alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih memilih pasangan Eri-Armuji ini seperti apa, karena tentu masing-masing pemilih dalam menggunakan hak suaranya memiliki alasan dibaliknya, bagaimana interpretasi pemilih terkait dengan figuritas tokoh Tri Rismaharini, sepakat dengan hal tersebut atau tidak, serta bagaimana interpretasi pemilih terkait dengan pengetahuan dan pemahaman akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji, kemudian seberapa tinggi atau rendah tingkatan diantara kedua hal tersebut.

Peneliti memandang fenomena ini menjadi sebuah hal yang layak dan menarik untuk ditemukan jawabannya, mencari alasan pemilih dalam menentukan preferensi politiknya yakni memilih pasangan Eri-Armuji jika dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan pendekatan rasional, serta tingkatan diantara keduanya.

Penelitian dengan konteks Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 yang sudah ada sebelumnya, beberapa menyoroti pada strategi pemenangan Eri-Armuji, kemudian strategi kampanye di masa pandemi, belum ditemukan oleh peneliti yang

berfokus pada perilaku memilihnya. Oleh karena itu peneliti disini hendak berfokus pada perilaku memilih, sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada kali ini, dengan sumber data dari pemilih langsung yang memutuskan preferensi politiknya.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Deskriptif: Tingkat Figuritas Tokoh Tri Rismaharini dan Pemahaman Pemilih akan Kapabilitas Pasangan Eri-Armuji (Preferensi Politik Pemilih Pasangan Eri-Armuji Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020)”

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran preferensi politik dari pemilih pasangan Eri-Armuji jika dilihat dari variabel figuritas Risma dan pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020?
2. Seberapa tinggi rendahnya tingkat figuritas tokoh Tri Rismaharini dan tingkat pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji pada pemilih pasangan Eri-Armuji dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran preferensi politik dari pemilih pasangan Eri-Armuji jika dilihat dari variabel figuritas Risma dan pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020
2. Untuk mengetahui tingkatan tinggi atau rendahnya figuritas tokoh Tri Rismaharini dan pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-

Armuji pada pemilih pasangan Eri-Armuji dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Manfaat Akademis, Untuk memberikan sumbangsih atau kontribusi pengetahuan dalam bidang politik terkait khususnya terkait dengan teori perilaku memilih, dengan konteks Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.
2. Manfaat Praktis, Penelitian yang akan dilakukan ini akan memberikan gambaran dan informasi tentang perilaku memilih dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Hasil penelitian tentang perilaku memilih, khususnya berkaitan dengan gambaran preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji jika dilihat dari pendekatan psikologis dan pendekatan rasional serta tingkatan figuritas tokoh Tri Rismaharini dan pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji pada pemilih pasangan Eri-Armuji dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan kajian, ataupun menjadi ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perilaku memilih.

1.5 Kajian Teoritik

Untuk dapat memahami secara komprehensif mengenai permasalahan dalam penelitian ini, tentunya landasan berpikir menjadi hal yang penting dalam proses pencarian data dan juga analisis dari penelitian ini. Dan berikut merupakan kajian teoritik atau landasan berpikir yang akan penulis paparkan :

1.5.1 Demokrasi

Istilah demokrasi jika dilihat dari tinjauan bahasanya terbagi dari dua kata, yang merupakan bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dalam arti spesifik yaitu penduduk suatu tempat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau dalam hal ini

merujuk pada kedaulatan (Tutik, 2010). Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Perwujudan atau manifestasi kedaulatan rakyat adalah penyerahan kepada rakyat untuk berperan aktif dan turut serta dalam pengambilan keputusan politik dalam kehidupan bernegara. Agar *goals* kedaulatan rakyat itu bisa tercapai maka menjadi hal yang mutlak untuk turut berupaya menegakkan hukum dengan landasan demokrasi yang seimbang.

Dalam demokrasi termuat nilai-nilai partisipatif dan kembali pada esensi demokrasi itu sendiri yaitu kedaulatan rakyat yang harus senantiasa dijunjung tinggi dan dijamin pelaksanaannya baik dari warga negara dan juga pemerintahan dalam level eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam prakteknya masyarakat akan diberikan ruang dan kebebasan untuk turut serta dalam proses perwujudan demokrasi, Keikutsertaan warga negara dalam prosesnya diatur dalam mekanisme yang prosedural dan dalam konteks yang cenderung momentual.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi salah satu syarat dalam perwujudan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum dinilai menjadi sebuah tolok ukur dari demokrasi. Ouput atau hasil dari pemilihan umum yang berlangsung dengan pelaksanaan yang terbuka, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berserikat, dinilai sebagai gambaran yang cukup akurat soal partisipasi dan aspirasi masyarakat.(Budiarjo, 2008).

Terdapat pula sebuah prinsip demokrasi yang menjadi salah satu standar atau ukuran disebut sebagai sebuah pemerintahan yang demokratis meliputi beberapa pilar yaitu lembaga legislatif berkedudukan sebagai wakil rakyat, kemudian lembaga eksekutif berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan, lembaga yudikatif berkedudukan sebagai yang memutuskan hukum dan keadilan serta adanya pers yang berkedudukan sebagai media kontrol bagi masyarakat (Wijayanti dan Prasetyoningsih, 2009).

Secara prinsip demokrasi merujuk pada kedaulatan rakyat dan esensi dari demokrasi itu sendiri harus terus dijaga dan ditegakkan. Berbicara demokrasi juga akan erat kaitannya dengan partisipasi rakyat secara aktif, penyelenggaraan pemilihan umum, dan beberapa elemen lainnya yang menjadi indikasi bahwa

pelaksanaan demokrasi sudah ditegakkan, beberapa ilmuwan politik merumuskannya dalam Gaffar (2000), yaitu yang pertama akuntabilitas, merujuk pada pemegang jabatan yang wajib untuk mempertanggungjawabkan tiap keputusan dan kebijakan yang akan dibuat, kemudian yang kedua rotasi kekuasaan, lalu yang ketiga rekrutmen politik yang merujuk pada perwujudan rotasi kekuasaan bahwa tiap orang yang memenuhi syarat untuk maju dalam kontestasi politik mempunyai hak dan prospek yang sama, kemudian yang keempat adalah pemilihan umum, bahwa ini merupakan konsekuensi dari negara demokrasi, hak untuk memilih, dipilih. Kemudian yang terakhir adalah berbicara soal hak-hak dasar, bahwa tiap warga negara dapat mendapatkan hak-hak dasar mereka.

1.5.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum menjadi salah satu wadah untuk menyalurkan hak asasi warga negara yang sangat utama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Dalam penerapannya manifestasi dari kedaulatan rakyat adalah dibentuknya suatu lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang nanti anggotanya akan dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Menurut Sarbaini (2015) Pemilihan umum diartikan sebagai sebuah arena atau wadah pertarungan untuk menduduki jabatan politik yang ada di pemerintahan dan pelaksanaannya menggunakan cara atau mekanisme pemilihan yang dapat dilakukan oleh warga negeri yang memenuhi syarat.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Pemilu menjadi sebuah wadah atau sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Makna langsung disini adalah pemilih dengan hak suaranya dapat memilih secara langsung dalam kontestasi atau pemilihan umum yang sedang berlangsung, sesuai dengan kehendak dari pemilih dan langsung

dilakukan oleh dirinya sendiri. Kemudian asas yang kedua yaitu umum merujuk pada pemberlakuan pemilihan umum yang ditujukan bagi seluruh warga negara yang sesuai dengan persyaratan yang ada, tidak terjadi pembedaan baik dalam hal agama, suku, jenis kelamin, ras, dan yang lainnya. Asas yang ketiga yaitu bebas, dalam hal ini warga negara yang memiliki hak suara atau pemilih disini dibebaskan untuk memilih atau menentukan siapa yang akan dipilih, yang dianggap dapat menjadi perantara bagi suaranya, tanpa ada unsur paksaan. Rahasia artinya pemilih dalam memilih atau menggunakan hak suaranya tidak diketahui oleh siapapun yaitu bersifat rahasia, terkecuali pasca pemilihan atau pemilih sudah keluar dari tempat pemungutan suara dan atas kehendaknya sendiri berkenan mengungkapkan pilihannya. Jujur artinya baik pemilih dan penyelenggara pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian adil merujuk pada proses pelaksanaan pemilih bahwa baik warga negara yang memiliki hak pilih dan peserta pemilihan umum berhak mendapatkan perlakuan yang sama, adil, dan tidak dicurangi oleh pihak manapun. Pelaksanaan pemilihan umum juga dilaksanakan secara periodik.

Pemilihan umum diartikan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan diartikan sebagai suatu wadah untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat. Dalam penerapannya tidak dipungkiri tercipta sebuah suasana kompetisi yang begitu kental bahkan sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dari para calon, suasana politik yang tercipta juga memberikan efek besar terhadap masyarakat, sehingga hal ini bukan menjadi fenomena politik yang biasa saja, namun memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap masyarakat, khususnya mereka yang memiliki hak pilih.

Dari pelaksanaan pemilihan umum yang ada dapat dilihat gambaran atau pola akan kesadaran politik dari masyarakat serta bagaimana mereka berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, dilihat dari efek sosialnya maka dapat diamati pula bagaimana gambaran dan pola perilaku dari masyarakat dalam menyikapi fenomena pemilu atau kontestasi politik yang ada. Dapat diketahui pula dalam pelaksanaan pemilu pasti akan melibatkan rakyat sebagai pemilih, partai

politik sebagai kendaraan bagi para calon, dan negara itu sendiri. Masing-masing memiliki kedudukan tersendiri, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum memiliki *goals* untuk memilih seseorang atau partai politik untuk mendapatkan posisi tertentu dalam lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) memiliki tujuan yang dirumuskan menjadi empat macam menurut Asshiddiqie (2007) yaitu :

1. Untuk memungkinkan adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan yang dilaksanakan secara tertib (teratur) dan damai (aman)
2. Untuk memungkinkan terjadinya perubahan pejabat yang menyandang status mewakili kepentingan atau aspirasi rakyat di lembaga perwakilannya
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara

Kembali pada pelaksanaan pemilihan umum yang menjadi salah satu manifestasi kedaulatan rakyat, maka idealnya rakyat harus turut aktif atau mengambil keputusan, salah satunya dengan ikut memilih perantara atau wakilnya, Dalam kontestasi politik atau pemilu maka dari sisi wakil rakyat atau calon pejabat pemerintah juga tentu sangat membutuhkan dukungan dan legitimasi dari rakyatnya, harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pengakuan secara hukum dan juga politik. Sehingga pemilihan umum tidak hanya berbicara soal kepentingan warga negara, namun juga penting berbicara soal partai politik, ataupun calon pejabat pemerintahan yang ada.

Signifikasi antara pemilu dan demokrasi cukup tinggi dengan catatan aturan dan pelaksanaannya menjamin hak-hak asasi manusia. Fatah (1998) menjelaskan bahwa hubungan tersebut dapat diwujudkan apabila pemilu memiliki syarat soal terwujudnya pemilu yang demokrasi dan kompetitif, yaitu :

1. Ada pengakuan terhadap hak pilih yang universal

2. Ada keleluasaan untuk membentuk wadah yang mencakup berbagai kemajemukan aspirasi dari pemilih
3. Ada mekanisme rekrutmen politik yang demokratis
4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya
5. Ada panitia pemilihan yang memiliki indenpendensi
6. Ada keleluasaan bagi tiap calon untuk dapat bersaing secara sehat
7. Ada perhitungan suara yang jujur
8. Netralitas birokrasi

1.5.3 Perilaku Politik

Dalam kehidupan keseharian, manusia menghasilkan suatu perilaku dan dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Perilaku dan interaksi yang terjadi ada yang digolongkan masuk pada perilaku politik, ada juga yang termasuk perilaku ekonomi, kemudian perilaku agama, budaya, dan yang lainnya.

1.5.3.1 Sejarah dan Perkembangan Perilaku Politik

Sejarah munculnya aliran perilaku politik diawali sejak pertengahan abad ke-19, adanya analisis politik dilakukan secara ilmiah, Indikasinya adalah terdapat kuliah-kuliah sains politik yang pada tahun 1870-an juga sudah diperkenalkan di berbagai universitas, seperti Oxford, Paris, dan Columbia. Menurut Heywood (2014) puncaknya terjadi di sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, khususnya di Amerika Serikat yang fokusnya banyak mengkaji soal perilaku politik. (Hamid, 2020). Perkembangan ilmu tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keilmiahan yang melengkapi studi tentang ilmu politik yang sebelumnya juga belum dibuktikan, terdapat sebuah data yang bernilai obyektif, kemudian dapat diukur untuk kemudian dilakukan pengujian hipotesis, membawa konsekuensi bahwa ilmu politik tidak hanya dikaji secara kualitatif saja, melainkan juga secara kuantitatif.

Menurut David Easton (dalam Heywood, 2014) Ilmu Politik dapat berkembang dengan mengambil metodologi dari ilmu pengetahuan alam dan menghasilkan sebuah studi baru yang inovatif dan sesuai dengan konteks penggunaannya, yakni dalam metode penelitian kuantitatif, seperti perilaku

memilih, perilaku para pembuat keputusan, dan perilaku dari para politisi dan pelobi. Kajian soal perilaku politik menjadi sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh kaum *behavioralis* dengan memusatkan individu sebagai insan politik daripada sistem atau lembaga politik, Sehingga pendekatan ini memiliki kedudukan untuk mengamati sebuah perilaku yang dihasilkan oleh seseorang dengan melihat pada aspek keterhubungannya antara pengetahuan politik dan perilaku yang dihasilkan, hal ini mencakup pada proses terbentuknya suatu pendapat politik, kemampuan dalam berpolitik, dan kesadaran akan peristiwa politik yang terjadi. (Epter, 1997). Perkembangan kajian ini merupakan bentuk protes dari kaum *behavioralis* terhadap kaum yang beraliran tradisional (dikenal juga dengan pendekatan legal institusional) yakni negara menjadi fokus utama, spesifiknya dalam hal konstitusional dan yuridisnya.

Menurut Varma (dalam Hamid, 2020) Satu hal yang penting dari pendekatan perilaku adalah anggapan yang menunjukkan bahwa tidak ada gunanya jika hanya mempersoalkan lembaga formal saja, hal yang demikian tidak memberikan banyak informasi soal proses politik yang terjadi bagaimana, sebaliknya akan lebih berguna jika mempersoalkan atau mempelajari perilaku perorangan (*behavior*) karena akan dapat mengamati gejala-gejala yang ada. Soal perilaku juga tidak hanya terbatas pada perorangan melainkan juga dapat mencakup suatu kelompok, seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, masyarakat politik, juga gerakan nasional. Sehingga dapat dipahami bahwa *behavioralisme* memiliki keyakinan bahwa teori sosial harus dibangun atas dasar perilaku yang bisa diamati, terdapat data yang bisa diukur, dan kecenderungan mengarah pada kajian-kajian yang sifatnya mengamati gejala dan tendensi politik yang ada.

Jika berbicara soal perkembangan perilaku politik erat juga kaitannya dengan membahas soal budaya politik. Budaya politik juga menjadi salah satu unsur yang mengikat dalam perilaku politik, Budaya Politik juga muncul dan mewarnai perkembangan ilmu politik, khususnya dalam konteks Amerika Serikat, terjadi sebuah revolusi dalam ilmu politik atau disebut dengan *Behavioral*

Revolution. (Gaffar, 2000), maksudnya adalah terjadi dampak dari semakin kuatnya mazhab positivisme, yakni paham yang mempercayai bahwa ilmu sosial dapat memberikan pemaparan akan gejala yang terjadi di kehidupan sosial kita, seperti ilmu alam akan memaparkan penjelasan terhadap gejala alam, dalam ilmu sosial merujuk pada ilmu politik.

Budaya politik sendiri merujuk pada suatu pola perilaku yang dilakukan oleh suatu tatanan masyarakat tertentu, hal ini mencakup pada kehidupan bernegara, adat istiadat, hukum, administrasi negara, politik pemerintahan, dan norma kebiasaan yang diyakini dan diresapi oleh masyarakat. Sederhananya, budaya politik menjadi suatu sistem nilai yang diyakini masyarakat bersama dengan kesadaran, kepekaan untuk aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang banyak dan aktif menentukan kebijakan publik.

Menurut Almond dan Powell (dalam Hamid, 2020) ada beberapa hal yang akan berimplikasi terhadap sebuah orientasi sikap politik, yakni :

- a. Orientasi Kognisi, merujuk pada pengetahuan dan kepercayaan akan terkait dengan informasi yang diketahui dalam konteks sistem politik dan bagaimana kedudukan serta hasil dari sistem politik itu sendiri.
- b. Orientasi Afeksi, merujuk pada adanya sebuah perasaan yang mengikat dan, perasaan terlibat, perasaan penolakan juga aliansi soal sistem politik yang dapat berimplikasi pada perasaan positif dan negatif terhadap sistem politik, seperti adanya rasa sedih dan bangga.
- c. Orientasi Evaluasi, merujuk pada kesimpulan atas orientasi kognisi dan afeksi, ada proses menilai, memberikan pandangan atas obyek politik.

Ketiga orientasi tersebut menjadi sebuah satu kesatuan dan saling berhubungan dan akan terlihat dalam berbagai pola interaksi yang ada, dalam konteks politik. Perilaku politik akan selalu dikaitkan dengan konsep budaya politik karena keduanya memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya.

1.5.3.2 Memahami Realitas Perilaku Politik

Secara sederhana, jika mencoba memaknai “perilaku” itu sendiri maka merujuk pada bagaimana respon atau reaksi seseorang atas stimulus yang didapatinya. Kemudian berwujud atau teridentifikasi menjadi sebuah perilaku. Perilaku sendiri senantiasa tidak konstan dalam arti ketika muncul sebuah perilaku maka ada sebab-sebab yang membuat perilaku tersebut terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bagaimana pikiran dan perasaannya, kebutuhannya, nilai-nilai yang dianut, atau bahkan faktor lingkungan, dan berbagai faktor lainnya. Jika unsur dalam perilaku tersebut bertambah, yaitu “perilaku politik” maka hal ini merujuk pada suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan warga negara baik secara individu atau kelompok yang dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau kebijakan politik yang dibuat. Lebih lanjut lagi jika perilaku politik yang muncul baik secara individu maupun kolektif yang berpengaruh dalam tatanan atau sistem politik yang ada, kemudian membentuk sebuah pola politik masyarakat, dan hasilnya akan memunculkan sebuah keputusan politik atas dasar sikap-sikap tersebut maka akan terbentuk sebuah budaya politik.

Jika melihat titik perbedaannya maka perilaku politik lebih mengarah pada tindakan yang dihasilkan oleh individu yang memiliki cara pandang dan faktor-faktor tertentu yang berpengaruh pada sistem politik yang terjadi, sedangkan budaya politik lebih mengarah pada pelebagaan dari perilaku politik warga negara yang sudah menjadi suatu kesatuan, diyakini bersama dalam aktivitas sosial dan politik yang terjadi.

Menurut Anthony Downs (dalam Hamid, 2020) yang disebut perilaku politik adalah tindakan atau gabungan organisasi yang mencakup individu dalam sebuah negara untuk turut serta mempengaruhi keputusan pemerintahan yang jalurnya adalah lewat pemilihan anggota konstitusi dan kepala pemerintahan.

Perilaku politik adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan warga negara sebagai individu yang memiliki maksud atau tujuan untuk mempengaruhi perumusan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya bisa secara individu maupun kolektif, bisa secara terorganisir maupun spontan, bisa secara utuh maupun

sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, bersifat legal atau tidak, sampai pada tataran termasuk tindakan yang efektif atau tidak. (Huntington dan Nelson, 1994)

Menurut Surbakti (2010), perilaku politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Adanya interaksi antara masyarakat dengan pemerintahan dalam kegiatan atau aktivitas tersebut. Terdapat tiga kategorisasi, yang pertama individu aktor politik yang mencakup pemimpin, aktivits politik, dan warga negara biasa. Kemudian kategori yang kedua adalah agregasi, yang merujuk pada individu aktor politik secara kolektif, baik kelompok kepentingan, kemudian birokrasi, partai politik, dan juga lembaga pemerintah. Kategori ketiga berkenaan dengan tipe keperibadian politiknya, berbicara soal cara memimpinnya. Jika memfokuskan pada subjek atau aktornya, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yakni perilaku politik dari lembaga atau para pemerintah dan perilaku politik dari warga negara biasa. Tentu keduanya memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda. Para pejabat pemerintahan atau lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, juga menegakkan keputusan politik yang ada, bentuk aktivitas atau perilaku politik dari warga negara biasa akan mempengaruhi pihak pemerintahan, keduanya akan saling terkait.

Dapat dipahami secara keseluruhan bahwa perilaku politik ini jika dilihat dari sudut pandang sebagai sebuah perspektif politik masuk dalam kategori pengembangan dan pengaplikasian untuk melihat, mengamati, dan lebih berfokus pada perilaku seseorang daripada lembaga politik, aspek pentingnya ada pada tingkah lakunya.

1.5.3.3 Bentuk dan Fungsi Perilaku Politik

Semesta perilaku politik cukup luas, dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Begitu pula berbicara soal ouputnya, keputusan politik yang dihasilkan tidak hanya terpusat pada lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menentukan keputusan tersebut, namun juga dipengaruhi oleh kepribadian individu yang menentukan keputusan tersebut (Surbakti, 2010).

Lebih lanjut lagi terdapat faktor yang akan mempengaruhi perilaku politik yang muncul (Surbakti, 2010) yaitu lingkungan sosial politik tak langsung, hal ini mencakup sistem politik, ekonomi, dan budaya yang berlangsung serta media massa. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosial politik langsung, yang artinya memberikan pengaruh dan membentuk kepribadian aktor perilaku politik, baik pengaruh dari keluarga, agama, sekolah, bahkan juga kelompok pergaulannya, kemudian struktur kepribadiannya, bagaimana sikap yang dimunculkan, dan yang terakhir adalah situasi atau konteks yang melingkupi seperti cuaca, kondisi keluarga, kondisi ruang.

Gabriel Almond (dalam Hamid, 2020) menjelaskan bahwa bentuk perilaku politik dapat dikategorikan menjadi dua pola yakni :

- a. Pola *konvensional*, merujuk pada pemaknaan bahwa model perilaku politik yang sudah dianggap sebagai perilaku yang umum, kongkritnya meliputi aktivitas memilih dalam kontestasi politik yang ada, diskusi soal politik, kegiatan kampanye, kemudian proses lobi dan masuk dalam kelompok kepentingan.
- b. Pola *non-konvensional*, bentuk kongkritnya mengacu pada hal-hal yang tidak umum, kongkritnya seperti pengajuan petisi, kemudian melakukan demonstrasi, aksi mogok, melakukan kekerasan terhadap sekitar baik benda ataupun manusia, gerilya ataupun revolusi.

Huntinton dan Nelson (1994) memiliki pengkategorian yang terbagi menjadi empat bentuk, yakni :

- a. Aktivitas pemilihan, bentuknya seperti ikut memberikan suara, membantu kampanye dengan bentuk sumbangan, ikut bekerja dalam kegiatan pemilihan yang berlangsung, aktif mencari dukungan untuk calon yang didukung, atau sederhananya adalah aktivitas atau tindakan yang memiliki maksud untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
- b. Lobbying, maknanya disini merujuk pada usaha yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk bertemu pejabat pemerintahan

atau pimpinan politik agar bisa turut mempengaruhi keputusan yang dibuat.

- c. Aktivitas organisasi, kegiatannya meliputi kegiatan yang pelakunya disini adalah anggota atau memiliki jabatan pada suatu organisasi yang memiliki maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan.
- d. Mencari koneksi, kegiatan ini biasanya dilakukan secara individu dengan sasaran pejabat pemerintah dengan tujuan agar dapat mendapatkan manfaat atau *impact* yang baik.

Huntington dan Nelson (1994) juga memiliki pengkategorian perilaku politik yang dilihat dari motif atau hal yang mendorong partisipasi itu muncul, yakni :

- a. Partisipasi otonom, artinya sebuah perilaku politik itu memang didasari keinginan dari individu yang akan melakukan tindakan tersebut.
- b. Partisipasi mobilisasi, artinya sebuah perilaku politik yang muncul didasari karena orang lain, baik hal itu digerakkan atau diinginkan oleh orang yang mendorong, sehingga bukan atas dasar diri sendiri.

Melihat sebuah perilaku atau tindakan dalam konteks ini adalah perilaku politik, tentu juga memiliki sebuah kedudukan dan fungsinya. Robert Lane (dalam Hamid, 2020) memaparkan ada empat fungsi perilaku politik atau partisipasi politik bagi individu, yakni :

- a. Sebagai sebuah wadah untuk menggapai kebutuhan ekonomi.
- b. Sebagai sebuah wadah untuk memenuhi kebutuhan akan penyesuaian sosial.
- c. Sebagai sebuah wadah untuk menggapai nilai-nilai khusus.
- d. Sebagai sebuah wadah untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan psikologis tertentu.

Selain pada kedudukan untuk individu tentu perilaku politik yang ada juga memiliki fungsi yang memberikan dampak kepada pemerintah, menurut Komarudin Sahid (2011) diantaranya :

- a. Sebagai pendorong program pemerintah, artinya warga negara atau masyarakat disini juga memiliki peran atau kedudukan untuk memberikan dukungan terhadap program politik dan program pemerintahan yang ada.
- b. Sebagai wadah atau perantara untuk mewakili kepentingan warga negara agar menjadi sebuah saran terhadap pemerintah dalam melakukan proses pembangunan yang ada.
- c. Sebagai wadah untuk memberikan saran dan kritik terhadap pemerintahan dalam proses perumusan dan penyelenggaraan program pembangunan.

1.5.3.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik dan perilaku politik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah bagian atau semesta dari perilaku politik, sedangkan perilaku politik tidak selalu berbentuk partisipasi politik. Dapat dipahami pula bahwa substansi keduanya baik partisipasi politik dan perilaku politik adalah sebuah kegiatan politik, warga negara yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan dan warga dan warga negara biasa (Surbakti, 2010). Jika dilihat dari sudut pandang etimologi partisipasi maknanya adalah keikutsertaan, maka dalam dunia politik hal ini merujuk pada tindakan aktif atau ikut serta dalam berbagai aktivitas dan proses politik yang terjadi.

Nilai dari partisipasi politik cukup besar, bahwa warga negara secara tidak langsung dituntut untuk aktif atau ikut berpartisipasi, karena keputusan politik yang dirumuskan oleh pemerintah dan akan dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan bernegara itu mempengaruhi dan berkaitan dengan kehidupan warga negara.

Rush dan Althof (2000) menjelaskan tentang partisipasi politik, yaitu sebagai sebuah upaya yang terorganisir oleh warga dengan tujuan untuk memilih pemimpin mereka nantinya dan juga sebagai upaya mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Menurut Samuel P. Huntington, jika berbicara partisipasi politik maka cakupannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, baik kegiatan tersebut berhasil ataupun gagal. Lebih lanjut Huntington dan Joan (1994) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung tanpa perantara maupun secara tidak langsung.

Sehingga dalam hal ini partisipasi politik dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka turut serta dalam mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini termasuk dalam proses menentukan pemimpin atau perwakilan dalam pemerintahan dengan mekanisme yang teratur yaitu melalui sebuah pemilihan umum.

Menurut Ramlan Surbakti (2010) partisipasi politik dikategorikan dalam dua hal, yakni :

- a. Partisipasi Aktif, aktivitas yang orientasinya lebih pada proses input dan output politik, kongkritnya seperti mengusulkan soal kebijakan umum, memberikan alternatifnya, menyampaikan saran kritik dalam hal kebijakan publik, serta bayar kewajiban pajak dan ikut serta dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan.
- b. Partisipasi Pasif, aktivitas yang orientasinya lebih pada proses output atau hasil, kongkritnya seperti taat pada pemerintah, menerima dan turut serta melaksanakan keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Partisipasi politik ini juga berbicara soal kaitan dan hubungan antara kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan bagaimana kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan, tentu akan mempengaruhi kadar partisipasinya. Partisipasi politik juga erat kaitannya dengan proses perwujudan demokrasi dan soal

legitimasi. Sebagai contoh dalam konteks suatu pemilihan umum, bagaimana partisipasi dari warga juga akan mempengaruhi legitimasi terhadap calon pasangan yang dipilih, akan ada kecenderungan dan berbagai pertimbangan dalam proses menggunakan hak suaranya. Dalam sudut pandang pemilu, partisipasi masyarakat juga menjadi sarana kontrol terhadap pemerintahan.

Partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam konteks negara demokrasi dan juga sebagai tanda khusus terbentuknya modernisasi politik (Dewantara, 2019). Dalam konteks negara demokrasi maka partisipasi politik merupakan sebuah manifestasi dari kedaulatan rakyat, memiliki pengaruh yang kuat dalam perwujudan demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik dari warga negara maka akan berdampak baik pula terhadap proses pembangunan politik dan juga pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia.

Salah satu unsur penting dalam partisipasi politik adalah soal kesadaran masyarakat yang mana mereka sebagai subjek yang ikut serta mempengaruhi proses politik yang ada, dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum maka hal tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan demokrasi baik di level lokal maupun nasional. Berawal dari kesadaran dan diaktuskan dengan turut aktif berpartisipasi dalam proses politik yang berlangsung, mereka yang punya hak pilih kedudukannya sangat penting dengan menyalurkan suaranya secara langsung. Tanpa adanya kesadaran dan diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi politik yang ada maka akan sulit menciptakan iklim negara yang demokratis. Jika dalam pemilihan umum hasil partisipasi politik dari masyarakat rendah tentu ini menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan karena hal tersebut menjadi tolak ukur yang utama dalam perwujudan negara demokratis.

1.5.4 Pencitraan Politik

Menurut Anwar Arifin (2014) Pencitraan politik atau politik pencitraan merujuk pada makna yang sama. Dalam hal ini pencitraan diartikan sebagai penggambaran terhadap sesuatu. Citra bermakna gambaran, maka pencitraan bermakna sebagai penggambaran yang kemudian diterima oleh komunikan, karena

komunikasikan menerima informasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media.

Pencitraan disebut sebagai cara yang dilakukan individu untuk membangun keterhubungan dengan orang lain. Dalam konteks politik pencitraan bisa dilakukan lewat berbagai hal, diantaranya adalah *pure publicity* yaitu mempopulerkan dengan *setting* yang natural, lalu *free ride publicity*, yaitu publisitas dengan menggunakan pihak lain untuk membuat dirinya populer, dan *tie in publicity*, yaitu memanfaatkan keadaan luar biasa seperti bencana, serta *paid publicity*, yakni membuat dirinya populer dengan perantara program. (Nimmo, 2006).

Secara prinsip dapat dimaknai bahwa pencitraan dilakukan untuk memberi efek atau pengaruh terhadap masyarakat dalam konteks penelitian ini merujuk pada pemilih, dilakukan dengan cara membentuk citra yang positif kepada mereka dan membentuk opini publik positif terkait dirinya. Bahwa opini publik yang positif akan membawa pengaruh yang besar terhadap partai atau kandidat yang sedang bertarung dalam kontestasi politik yang terjadi. Menurut Firmanzah (2012) Pencitraan adalah sebuah konstruksi atas representasi dan persepsi yang terbentuk di benak masyarakat terkait dengan partai politik atau individu yang mana semuanya berkaitan dengan aktivitas politik.

Dalam konteks perilaku politik masyarakat dalam sebuah kontestasi politik, akan ada sebuah kecenderungan seseorang memilih partai, kandidat sebagai sebuah identitas, yang dimaksud adalah mereka memilihnya karena selaras dengan nilai-nilai yang dimiliki pemilih. Melalui sebuah pencitraan maka masyarakat akan memiliki persepsi yang sudah terpatrit dalam benak masyarakat, artinya bahwa citra politik akan memberikan dampak positif terhadap pemilih dalam proses penggunaan hak suaranya. Dalam penerapannya strategi pencitraan sebuah partai politik juga bisa dilakukan dengan membangun pencitraan individu, bahkan pencitraan individu yang ada di dalam partai politik atau citra personal yang

dibangun dimungkinkan dihubungkan dengan citra partai atau lembaganya dan orang-orang didalamnya.

Citra personal yang dibangun ini membentuk sebuah ikatan atau hubungan yang emosional dengan pemilih kedepannya, karena terbentuk kepercayaan hati yang besar terhadap figur tersebut yang tentu hal ini sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap partai politik yang membawa figur tersebut dan orang-orang didalamnya. Ini yang kemudian penulis kontekskan dalam penelitian kali ini bahwa citra politik Risma sudah terpatrit di benak masyarakat Kota Surabaya yang kemudian hal ini dimungkinkan berpengaruh atau menjadi alasan preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020, meskipun pengaruhnya adalah secara tidak langsung dalam arti citra politik Risma di konteks kali ini bukan berefek pada dirinya sendiri, melainkan dimungkinkan memberikan pengaruh terhadap calon pasangan yang diusung PDIP yang mana Risma berasal dari partai tersebut yaitu calon Walikota dan calon Wakil Walikota nomor urut 1 Eri-Armuji dan memang Risma memberikan dukungannya secara langsung.

Hal ini yang juga dipahami sebagai kemungkinan adanya efek elektoral. Istilah elektoral sendiri sering dikaitkan dengan politik pemerintahan, lebih lanjut lagi yang dimaksud dengan elektoral adalah pemilihan atau yang berkaitan dengan pemilihan. Dalam hal ini makna efek elektoral merujuk pada efek terhadap pemilihan umum dan pemilih itu sendiri, yang dalam konteks ini mengarah pada citra politik Risma terhadap calon Walikota dan calon Wakil Walikota nomor urut 1 Eri-Armuji. Peneliti menggunakan istilah figuritas untuk mewakili hal tersebut, bahwa citra politik yang terbentuk berefek pada masyarakat sebagai pemilih, terbentuk pula opini publik, dan sampai pada tataran pemilih memfigurkan Risma yang kemudian hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau menjadi alasan atas preferensi politik seseorang, khususnya dalam konteks ini adalah perilaku memilih.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Perilaku Memilih

Sebelum jauh membahas soal pendekatan perilaku memilih, terlebih dahulu harus paham dengan hakikat *voting* itu apa. Kegiatan *voting*, secara prinsip dikatakan oleh Evans Jocelyn A (2004) bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kegiatan memilih yang sudah biasa kita lakukan dalam keseharian, sebagai contoh ketika kita memilih barang.

Secara teoritis pendekatan yang bisa digunakan untuk mengetahui mengapa seseorang individu menjatuhkan pilihannya terhadap suatu hal dan tidak memilih yang selainnya adalah dengan menggunakan sudut pandang teori perilaku pemilih (*voter behavior*). Menurut Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012) perilaku pemilih adalah aktivitas yang dilakukan individu dalam memberikan suaranya terkait dengan keputusan memilih atau tidak memilih dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Jika pemilih menggunakan hak suaranya maka dapat dikatakan warga negara tersebut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung.

Berkenaan dengan perilaku memilih maka ini akan memberikan fokus dan perhatiannya terhadap individu karena sebagai subjek yang memilih dan akan ditelusuri atau dianalisis lebih mendalam terkait dengan alasan dibaliknya. Menurut Muhammad Asfar (2006) Analisa terkait perilaku memilih didasarkan pada tiga pendekatan model yaitu, :

1.6.1.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis memaparkan faktor yang bisa berpengaruh terhadap individu tertentu dalam menentukan perilaku memilih. Hal tersebut didasarkan pada karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial. Menurut Dieter Roth (2008) perilaku pemilih seseorang berkenaan dengan kelompok sosial dari mana individu itu berasal, artinya bahwa memang karakteristik sosial menentukan tendensi atau kecenderungan politik individu. Karakteristik sosial yang dimaksud adalah seperti: pekerjaan, pendidikan dan lainnya, dan karakteristik atau latarbelakang sosiologis meliputi: agama, domisili

tempat tinggal, jenis kelamin, umur dan lainnya, adalah faktor yang berperan dalam seseorang memutuskan pilihan politiknya, juga dianggap sebagai sesuatu yang mendasar dalam memahami perilaku politik seorang individu.

Dapat dipahami dari pendekatan sosiologis, klasifikasi yang dibuat tersebut mempunyai peran penting dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Pendekatan dari sudut pandang sosiologis ini awalnya berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, dikenal dengan Mahzab Columbia (Harahap, 2014). Terdapat beberapa aspek dalam pendekatan yang disebut dengan Mahzab Columbia ini :

a. Latar Belakang Sosiologis

Latar belakang sosiologis yang dimaksud adalah jenis kelamin, usia, wilayah, agama, dan faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Seperti jenis kelamin, adakalanya pemilih wanita cenderung memilih kandidat yang juga wanita, kemudian faktor usia yang dalam prakteknya juga terdapat Batasan usia bagi masyarakat yang akan terlibat dalam pemilihan, kemudian faktor wilayah dimana dimungkinkan ada suatu bentuk ikatan daerah yang menjadikan faktor perilaku memilih seseorang, ataupun faktor agama yang kerap kali juga mempengaruhi tendensi perilaku memilih seseorang.

b. Kelas Sosial

Makna kelas sosial disini adalah suatu status yang melekat pada individu seseorang yang kemudian dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku memilih seseorang, berasal dari tingkatan individu yang kaya atau miskin.

c. Predisposisi Sosial-Ekonomi

Dalam hal ini makna predisposisi sosial-ekonomi yang dimaksud terbagi atas dua hal, yang pertama dari keluarga dan yang kedua dari pemilih. Pilihan politik individu dapat dipengaruhi dari pilihan politik atau preferensi keluarganya, sedangkan makna pemilih disini pilihan politiknya bergantung pada aspek-aspek yang dianut oleh individu tersebut seperti agama, wilayah, kelas sosial, dan yang lain-lain.

Secara prinsip disebutkan bahwa adanya pengelompokan sosial ini dinilai memiliki peran yang cukup besar untuk membentuk sebuah sikap, pandangan, dan orientasi individu. (Haryanto, 2014)

Dalam konteks penelitian ini pendekatan perilaku memilih didasarkan pada sudut pandang sosiologis tidak digunakan, peneliti beranggapan bahwa variabel-variabel dalam pendekatan ini tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan sebagai alasan pemilih pasangan Eri-Armuji pada konteks Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020, selain itu peneliti memfokuskan pada variabel-variabel yang dinilai menarik dalam kajian penelitian itu berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, sehingga akan berfokus pada pendekatan psikologis dan pendekatan rasional, terlebih lagi yang menjadi analisis utama dari pendekatan ini lebih mengarah pada kondisi sosial, bukan berfokus pada individu yang dijadikan sebagai pusat analisis, sedangkan peneliti lebih berfokus pada aspek individunya.

1.6.1.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis ini muncul sebagai tanggapan atau ketidakpuasan atas pendekatan yang sebelumnya yaitu berkenaan dengan pendekatan sosiologis dalam pendekatan perilaku memilih. Pendekatan psikologis ini menunjukkan bahwa sikap seseorang itu dianggap sebagai refleksi atau cerminan dari kepribadian seseorang, yang kemudian ini menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi tendensi atau kecenderungan perilaku politik seseorang itu seperti apa. Afan Gaffar (1992) menyebutkan dalam pendekatan ini yang menjadi titik penentunya adalah kekuatan psikologis yang ada dalam dirinya yang mana hal tersebut didapatkan dari proses interaksi atau sosialisasi politik yang ada.

Pendekatan ini dikenal dengan Mahzab Michigan, muncul dari kalangan ilmuan di Amerika Serikat yang dikembangkan melalui Survey Research Center di Universitas Michigan (Chandra, 2016). Titik tekan pendekatan psikologis itu terbagi menjadi tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yang dinilai sebagai kaitan antara psikologi manusia dengan variabel-variabel dalam pemilihan umum, yang pertama yaitu ikatan emosional terhadap suatu partai politik atau identifikasi

kepartaian, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Roth (dalam Haryanto, 2014) yang memaparkan bahwa pendekatan ini berupaya menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada keputusan dalam pemilihan umum melalui *tria determinant* (Identifikasi partai, orientasi isu, dan orientasi kandidat).

a. Identifikasi Kepartaian

Pusat dalam pendekatan ini adalah sikap, berbicara soal sikap sendiri itu mengarah pada penilaian seseorang terhadap sebuah objek atau sesuatu yang tentunya juga terdapat motivasi atau dorongan sesuai dengan minat seseorang. Sikap seseorang itu juga dibentuk melalui sebuah proses, ketika di masa kanak-kanak, kemudian saat menginjak dewasa yang mana akan terjadi proses dimana mereka menanggapi isu-isu politik yang didapatkan, dan juga akan terjadi di masa ketika seseorang bersosialisasi dengan seseorang lainnya dalam sebuah wadah tertentu. Hal ini akan memunculkan ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik, inilah yang dipahami sebagai identifikasi kepartaian. Sederhananya dalam benak seseorang muncul sebuah keterikatan dengan partai tertentu meskipun dalam hal ini individu tersebut bukan merupakan anggota dari partai tersebut.

Pendekatan psikologis berbicara soal adanya ikatan emosial yang mengarahkan pilihan atau keputusan politik seseorang dalam sebuah kontestasi politik, identifikasi yang muncul juga bisa dilihat dari dua indikator yakni soal ketokohan dan identifikasi partai itu sendiri. Ketokohan berbicara soal adanya ikatan emosional yang dijadikan pijakan dalam memilih pemimpin, baik identitas atau ketokohan kandidat, tokoh yang ada di balik kandidat termasuk tokoh yang dijadikan sosok panutan atau disenangi pemilih. Sebaliknya identifikasi partai lebih pada kesamaan antara partai yang disenangi dan partai yang dipilih oleh pemilih

b. Orientasi terhadap Isu

Dijelaskan bahwa orientasi isu yang dimaksud adalah semakin seseorang pemilih menilai sebuah isu itu sangat penting, maka kemungkinannya ia akan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung, terlebih lagi jika

solusi yang diberikan oleh calon dianggap sesuai maka akan semakin besar pula kemungkinan seseorang dalam memilih partai atau calon yang bersangkutan. Dalam perkembangannya orientasi isu ini juga dikaitkan dengan dibangunnya citra politik atau kesan politik terkait kandidat yang membuat pemilih menjatuhkan pilihannya terhadap partai atau calon kandidat tertentu.

c. Orientasi terhadap Kandidat

Berkenaan dengan orientasi kandidat ini berbicara soal pandangan pemilih dengan kandidat dari partai itu seperti apa, menurut Dieter Roth (2008) jika pemilih semakin dekat maka semakin besar pula kemungkinan seseorang akan memilih kandidat dari partai tertentu. Aspek yang dilihat adalah popularitasnya, reputasi yang dimilikinya, dan kemampuannya.

Bahwa yang perlu digarisbawahi dalam pendekatan ini adalah adanya ikatan psikologis yang akan mempengaruhi preferensi politik seseorang yang termuat dalam identifikasi partai, orientasi isu, dan orientasi kandidat, aspek-aspek psikologis yang dimaksud adalah perasaan, pengalaman, dan juga pemaknaan akan peristiwa politik yang terjadi dan dapat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang.

Jika dilihat dari sudut pandang tiga variabel tersebut, yakni identifikasi kepartaian, orientasi isu, dan orientasi kandidat maka merujuk pada variabel yang pertama yaitu soal identifikasi kepartaian. Fokus dari pendekatan ini merujuk pada keputusan atau perilaku dari pemilih, sangat dimungkinkan pemilih tidak tertarik pada partai politiknya, melainkan tertarik pada calon kandidatnya dan bagaimana ketokohan dibalik calon juga dapat mempengaruhi preferensi politik seseorang dan lebih jauh lagi juga dapat teridentifikasi dan dikuatkan melalui variabel orientasi isu yang dalam perkembangannya juga membahas soal kesan kandidat.

Dalam konteks penelitian kali ini, berdasarkan dari variabel diatas dan kembali pada hakikat pendekatan psikologis itu sendiri apa, maka peneliti berfokus pada variabel citra tokoh tertentu yang kemudian berpengaruh terhadap pasangan Eri-Armuji sehingga dalam konteks ini bukan pada kandidatnya langsung, dalam

hal ini adalah Tri Rismaharini, seperti yang sudah dijelaskan peneliti dalam latar belakang.

Dalam konteks penelitian kali ini peneliti berpandangan bahwa teori ini relevan digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis penelitian tentang preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji, bahwa variabel citra politik Risma dan figuritas yang dimiliki oleh Risma yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya relevan dimasukkan dalam kategori pendekatan psikologis, bahwa pemilih memiliki ikatan emosional dengan Risma, yang mana disini pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota nomor urut 1 Eri-Armuji dimungkinkan menerima dampak dari adanya citra politik yang dibentuk hingga akhirnya muncul persepsi bahwa memang pasangan calon ini khususnya Eri adalah calon yang dipersiapkan untuk menggantikan sosok Risma, melanjutkan perjuangan Risma, melalui isu ini kemudian Eri-Armuji menjadi populer dan reputasinya naik, bermula dari ikatan emosional yang terbentuk antara Risma dengan masyarakat Kota Surabaya yang khususnya mendukung dan menyenangi sosok Risma, bahwa kemungkinan figuritas tokoh Tri Rismaharini ini menjadi alasan dibalik preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji dan nantinya akan diketahui tingkatan tinggi atau rendahnya figuritas tersebut.

1.6.1.3 Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional ini muncul sebagai tanggapan atau kritik atas pendekatan sebelumnya, bahwa perilaku memilih itu bukan sesuatu yang dibuat saat menjelang atau ketika sudah berada pada tempat pemungutan suara, melainkan sudah dipikirkan sebelumnya, bahkan juga tidak dipungkiri bahwa pilihan politik dapat berubah dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Karakter sosiologis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu dianggap sebagai variabel yang berdiri sendiri mempengaruhi perilaku seseorang, sebagai contoh seseorang yang memiliki karakteristik sosial seperti jenis kelamin, agama, pekerjaan dan yang lainnya yang sama selama 17 tahun, namun dalam perilaku memilihnya memberikan suara yang tidak sama dalam tiap pemilihan umum yang diadakan,

maka mengartikan bahwa ada pengaruh dari variabel lain yang ikut berperan dalam mempengaruhi keputusan politik seseorang, bahwa tiap pemilih bebas dalam bertindak, faktor yang dimaksud itu bisa berdasarkan isu politik atau berkenaan dengan kandidat yang dicalonkan. Bisa dimaknai bahwa pendekatan dalam perilaku memilih tidak terbatas pada karakteristik sosiologis saja, melainkan dimungkinkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Pendekatan rasional seringkali disebut dengan Mahzab Rasional atau Ekonomi, bermula dari Anthony Down yang menggunakan asumsi atau pijakan dari teori modern dalam bukunya yaitu *An Economic Theory of Voting* di tahun 1957 yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Mahzab Ekonomi. Penggunaan analogi pasar terkait dengan perilaku memilih, dimana akan terjadi suatu penawaran (partai) dan permintaan (pemilih) dan kemudian pemilih akan bertindak secara rasional. (Ferdian et al, 2019).

Dapat kita pahami bahwa titik tekan dari penjelasan rasional merujuk pada tiap seseorang memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan atau pilihannya dengan mempertimbangkan informasi atau fenomena yang dihadapi, seperti isu politik yang berpengaruh dalam program yang ditawarkan seperti apa, kemudian persoalan kandidat bahwa pemilih dengan pendekatan rasional akan mencari tahu siapa dan bagaimana latar belakang pasangan kandidat yang tersebut. Bahwa pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan tanggapan atau penilaiannya terhadap isu politik dan kandidat yang diusung dalam pemilihan tersebut, bahwa pilihannya ditentukan berdasarkan pertimbangan yang merupakan hasil dari pemikiran seseorang.

Dalam pendekatan rasional ini pemilih akan menggunakan perhitungan untung rugi yang didapatkannya sebagai hasil dari keputusan politik yang diambil, Ruang lingkup perhitungannya dimulai dari memilih opsi yang paling memberikan keuntungan yang besar atau mendatangkan kerugian yang sedikit, serta memilih opsi yang risikonya paling minim. Bahwa dalam hal ini pertimbangan yang

dihasilkan adalah secara rasional. Dan bisa menilai isu-isu politik yang terjadi. (Asfar, 2006). Jika disederhanakan pendekatan rasional ini berbicara soal dua hal yakni :

a. Orientasi Visi Misi

Makna orientasi visi misi disini merujuk pada program kandidat, bagaimana sejauh mana seseorang pemilih mengetahui dan memahami visi misi dan juga program yang ditawarkan kandidat kepada pemilih sebagai sebuah produk politik yang dipunya.

b. Orientasi Kandidat

Orientasi kandidat merujuk pada sejauh mana seseorang pemilih mengetahui dan memahami kualitas kandidat yang akan dipilihnya, seperti bagaimana kedudukan, prestasi, rekam jejak, bahkan juga popularitas kandidat, yang mana unsur-unsur tersebut berkaitan dengan berbagai bidang yang ditekuni kandidat untuk menunjukkan kompetensi atau kapabilitas yang dimiliki kandidat dalam mewujudkan program yang ditawarkan kepada pemilih, apakah kualitas kandidat dinilai mumpuni untuk merealisasikan produk politik yang ditawarkan atau tidak.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan rasional juga bisa dijadikan pijakan untuk mengetahui perilaku memilih seseorang, peneliti dalam latar belakang sudah menjelaskan bahwa selain variabel figuritas dari tokoh Tri Rismaharini, pasangan Eri-Amuji juga memiliki modal yang cukup bagus, dalam hal ini dari latar belakang pasangan yang merujuk pada kapabilitas pasangan calon, bahwa dimungkinkan pula terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi pemilih, dalam hal ini yang dimaksud adalah pertimbangan yang diputuskan secara rasional seperti latar belakang kandidat, prestasi kandidat, *track record* kandidat, bahwa murni dari pertimbangan rasional, bukan dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya lebih emosional. Sehingga selain menggunakan pendekatan psikologis, kajian atau penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan rasional dalam konteks

menganalisa perilaku memilih masyarakat dalam Pilkada Surabaya Tahun 2020, dalam kasus memilih pasangan Eri-Armuji.

Bahwa dimungkinkan yang menjadi alasan dibalik preferensi politik pemilih tidak hanya berbicara soal efek dari figuritas Risma melainkan juga didukung oleh faktor dari pasangan Eri-Armuji sendiri yakni modal atau kapabilitas yang dimiliki pasangan Eri-Armuji menjadi alasan dibalik preferensi politik pemilih dan akan diketahui tingkatan tinggi atau rendahnya pemahaman pemilih.

Peneliti juga beranggapan bahwa ketika sedari awal berfokus pada perilaku memilih, hendak menelusuri sikap pemilih, maka kaca mata yang digunakan tidak bisa hanya dari satu hal saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, keputusan memilih merupakan wujud perilaku yang terbentuk dari interaksi dan hubungan antar berbagai komponen dan pendalaman penelitian ini juga hendak mengetahui tingkatan tinggi atau rendahnya.

1.7 Definisi Operasional

Variabel diartikan sebagai atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang memiliki variasi dan hal tersebut ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau dipahami dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2008).

Berdasarkan pemaparan teori yang sudah dijelaskan, dalam penelitian ini berfokus pada dua pendekatan yang berpijak dari teori perilaku memilih. Variabel yang pertama adalah figuritas tokoh Tri Rismaharini (pendekatan psikologis) dan variabel yang kedua adalah pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji (pendekatan rasional) yang nantinya juga akan dihitung dan diketahui tingkatan tinggi atau rendah dua variabel tersebut.

1.7.1 Figuritas Tokoh

Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini yakni figuritas tokoh Tri Rismaharini dalam perilaku memilih pasangan Eri-Armuji pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. Variabel ini peneliti analisis termasuk pada teori perilaku memilih pada pendekatan psikologis. Figuritas tokoh/elit politik

disini maknanya adalah efek dari figuritas Tri Rismaharini yang kemudian juga membentuk opini publik dan berpengaruh pada pasangan calon Eri-Armuji, dalam hal ini citra politik Risma sangat mengakar kuat di masyarakat Kota Surabaya, yang kemudian itu juga dimungkinkan berefek pada pasangan calon Eri-Armuji, belum lagi *positioning* yang dibentuk dan terbentuk pada pasangan Eri-Armuji adalah pasangan yang disiapkan untuk meneruskan kiprah Risma dalam melanjutkan program pembangunan di kota Surabaya dan hal tersebut juga ditegaskan oleh Tri Rismaharini yang kemudian masyarakat yang memiliki hak pilih bisa dipengaruhi oleh hal tersebut, bahwa karena didukung oleh Risma, disiapkan menjadi penerusnya dan Risma memiliki *track record* yang bisa terbilang baik dalam memimpin kota Surabaya, maka menjadi sebuah pilihan yang dianggap terbaik dalam memilih pasangan Eri-Armuji.

Sejalan dengan teori perilaku memilih dengan pendekatan psikologis, dimana hal ini dimungkinkan menjadi pertimbangan psikologis atau alasan dibalik preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji, ada ikatan emosional dengan calon disebabkan karena hal tertentu, terbentuk sebuah persepsi yang kemudian menghasilkan sebuah sikap, dalam hal ini adalah preferensi politik pasangan Eri-Armuji dalam konteks Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Kemudian juga akan diketahui tingkatan figuritas tokoh Tri Rismaharini dilihat dari sudut pandang pemilih pasangan Eri-Armuji seberapa tinggi atau dikategorikan seperti apa.

Ukuran atau indikator figuritas tokoh Tri Rismaharini dilihat dari :

1. Kinerja Tri Rismaharini selama menjabat sebagai Walikota Surabaya
Pemaknaan kinerja yang dimaksud adalah bagaimana pemilih melihat sosok atau tokoh Tri Rismaharini selama menjabat sebagai Walikota Surabaya, misalnya program apa yang digagas oleh Risma, inovasi atau kebijakan baru apa yang dihasilkan Risma selama menjadi Walikota Surabaya, dan hal-hal lain yang dilakukan Risma guna membangun Kota Surabaya yang kemudian

memberikan hasil atau dampak kepada masyarakat sehingga pemilih menjadikannya sebagai indikator, puas atau tidak dengan kinerja Risma.

2. Relasi pemilih pasangan Eri-Armuji dengan Tri Rismaharini

Makna relasi pemilih dengan Tri Rismaharini adalah ikatan yang dirasakan pemilih dalam memandang sosok Risma, sejauh mana pemilih menyenangi Risma karena kinerjanya sampai kemudian menjadikan Risma sebagai sosok panutan atau tokoh yang dipandang oleh pemilih.

3. Relasi Risma dengan pasangan Eri-Armuji

Maknanya disini adalah figuritas Risma yang kemudian diukur atau diartikan melalui perilaku Risma atau keterikatannya dengan pasangan Eri-Armuji yakni menyatakan dukungan secara langsung kepada pasangan Eri-Armuji yang kemudian itu berdampak pada pemilih pasangan Eri-Armuji.

1.7.2 Kapabilitas Pasangan Calon / Orientasi Kandidat

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini yakni dilihat dari sudut pandang pendekatan rasional, lebih lanjut lagi soal pemahaman kapabilitas pasangan calon Eri-Armuji dalam perilaku memilih pasangan Eri-Armuji pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. Variabel ini peneliti analisis termasuk pada teori perilaku memilih pada pendekatan rasional.

Orientasi kandidat yang dimaksud disini maknanya adalah pemilih memandang kandidat dengan pendekatan yang rasional, terdapat sebuah penilaian yang valid terhadap kandidat tanpa dipengaruhi oleh ikatan atau hal yang emosional, dilakukan penilaian dengan pertimbangan untung rugi, penilaian yang rasional, bagaimana dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih kemudian dianalisis secara rasional, dalam hal ini merujuk pada kapabilitas calon, bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh pasangan calon, kecakapan calon dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pencalonannya pada saat itu, bagaimana prestasi dari mereka, dan juga rekam jejaknya, yang kemudian hal-hal tersebut akan dinilai menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, bagaimana dengan modal yang

dimiliki oleh pasangan calon dapat membawa pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan pembangunan kota Surabaya kedepannya.

Sejalan dengan teori perilaku memilih pada pendekatan rasional, dimana hal ini dimungkinkan menjadi salah satu pertimbangan yang diputuskan secara rasional atau merupakan alasan dibalik preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji, dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan kandidat yaitu dalam ruang lingkup kapabilitas kandidat seperti apa. Kemudian juga akan diketahui tingkatan pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji dilihat dari sudut pandang pemilih pasangan Eri-Armuji seberapa tinggi atau dikategorikan seperti apa.

Ukuran atau indikator pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji dilihat dari :

1. Pengetahuan pemilih pasangan Eri-Armuji

Pengetahuan pemilih yang dimaksud adalah sejauh mana pemilih pasangan Eri-Armuji memiliki pengetahuan terkait dengan pasangan Eri-Armuji, spesifiknya pada *background* pasangan Eri-Armuji.

2. *Background* pasangan Eri-Armuji

Background atau dapat dimaknai juga rekam jejak dan juga prestasi dari pasangan Eri-Armuji, khususnya yang berkaitan dengan pencalonannya yakni Eri yang merupakan birokrat berpengalaman dan Armuji yang merupakan politisi yang juga sangat berpengalaman.

3. Efikasi politik dari pemilih pasangan Eri-Armuji

Makna efikasi politik disini adalah hasil yang diinginkan atau harapan dari pemilih pasangan Eri-Armuji dengan modal atau kapabilitas pasangan Eri-Armuji, jika mereka terpilih harapannya mampu membangun Kota Surabaya menjadi lebih baik dan akan berdampak pada pemilih pasangan Eri-Armuji sebagai warga Kota Surabaya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian tentang studi deskriptif mengenai tingkat figuritas tokoh Tri Rismaharini dan pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji (preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020) memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan perilaku memilih masyarakat atau preferensi politik pemilih pasangan nomor urut 1 Eri-Armuji jika dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan pendekatan rasional pada teori perilaku memilih serta hendak mengetahui tingkatan pada dua variabel tersebut.

Penelitian deskriptif dengan dua variabel, yakni variabel figuritas tokoh Tri Rismaharini (pendekatan psikologis) dan variabel pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji (pendekatan rasional). Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan cermat soal keadaan dan karakter dari populasi atau suatu bidang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D”, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian terhadap populasi ataupun sampel yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian dalam proses pengumpulan data juga menggunakan populasi atau sampel tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, dalam hal pengumpulan data maka penelitian menggunakan instrumen penelitian yang sudah dibuat sebelumnya, yakni kuisioner, kemudian di tahap analisis data karena ini sifatnya adalah penelitian kuantitatif, maka analisis datanya juga bersifat kuantitatif atau statistik dan biasanya menguji hipotesis.

Sederhananya kuantitatif berkaitan dengan data-data numerikal (angka) yang kemudian akan diolah dengan metode statistika. Statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif bukan statistik inferensial atau hendak menguji hipotesis.

Statistik deskriptif dalam menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

1.8.2 Fokus Penelitian

Untuk menghindari adanya bias dari permasalahan yang di rumuskan, maka perlu batasan atau fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian ini adalah berupaya menggambarkan dan menganalisis preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji yang dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan pendekatan rasional yang kemudian juga hendak mengukur tingkat kedua variabel tersebut.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di wilayah kota Surabaya dengan mencakup seluruh kecamatan yang ada di kota Surabaya. Dengan batasan sampel di tiap tingkat kecamatan atau tiap daerah pemilihan untuk memudahkan penentuan dan pencarian data.

1.8.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan populasi yang merupakan satuan yang ingin diteliti dan sampel merupakan bagian yang ingin diteliti. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi yang akan diteliti adalah masyarakat Kota Surabaya yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Surabaya tahun 2020 dan spesifiknya lagi pada masyarakat Kota Surabaya yang menggunakan hak pilihnya dan memilih pasangan Eri-Armuji.

Sampel merupakan beberapa jumlah anggota yang sudah dipilih untuk mewakili populasi. Asumsinya karena peneliti memiliki keterbatasan baik secara waktu, tenaga, ataupun dana, maka sebelumnya perlu dilakukan penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam konteks penelitian kali ini. Peneliti terlebih dahulu menghitung sampel dengan menggunakan rumus Slovin, dengan uraiain sebagai berikut :

Data daftar pemilih tetap Pilkada Kota Surabaya tahun 2020 adalah sebanyak 2.089.027, namun karena dalam konteks penelitian kali ini menasar pada pemilih pasangan Eri-Armuji maka populasinya adalah pemilih pasangan Eri-Armuji, dan data tersebut diketahui, data jumlah pemilih pasangan Eri-Armuji didapat dari hasil perolehan suara oleh KPU. Jumlah pemilih pasangan Eri-Armuji yakni sebanyak 597.540.

$$n = N : (1 + N \cdot e^2)$$

Keterangan :

n = besar sampel minimum

N = besar populasi = 597.540

E = kesalahan (absolut) yang dapat ditolerir yaitu 10% atau 0,1

$$n = 597.540 : (1 + 597.540 \cdot (0,1)^2)$$

$$n = 597.540 : (1 + 597.540 \cdot (0,01))$$

$$n = 597.540 : 5.975,4$$

$$n = 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus Slovin diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya kuota sampel yang dapat mewakili populasi sebanyak 597.540 pemilih pasangan Eri-Armuji adalah minimal sebanyak 100 orang. Maka dalam konteks penelitian kali ini minimal menggunakan sampel sebanyak 100 orang yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan untuk kemudian dapat menggambarkan dan menganalisis preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *random sampling*. Menurut Nasution (2009) *random sampling* berarti setiap unsur atau elemen dari jumlah keseluruhan populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Secara sederhana dapat diartikan bahwa bagian dari keseluruhan jumlah pemilih pasangan Eri-Armuji dalam konteks penelitian kali ini berkesempatan menjadi sampel penelitian.

Untuk mengambil sampel penelitian dilapangan, peneliti menggunakan dan menyampaikan beberapa kriteria respondennya, untuk memastikan responden yang

didapatkan sudah memenuhi kriteria persyaratan responden, yakni responden adalah warga Kota Surabaya yang ikut dalam Pilkada Surabaya Tahun 2020 dan memilih pasangan no.urut 1 yakni pasangan Eri-Armuji. Kemudian berpijak pada data dari KPU yakni jumlah pemilih pasangan Eri-Armuji di tiap kecamatannya maka kemudian adalah mencari dan memilih tiap individu dari tiap kecamatan dan memfilternya sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan yaitu dalam konteks penelitian kali ini adalah individu yang memilih pasangan nomor urut 1 Eri-Armuji. Penerapan teknik pengambilan sampel dengan *random sampling* maka secara acak membagikan kuisioner kepada calon responden dan menanyakan apakah responden ikut dalam Pilkada Surabaya Tahun 2020 dan memilih pasangan Eri-Armuji, jika tidak maka tidak bisa dijadikan responden. Selain itu peneliti juga membagikan tautan kuisioner online di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga Whatsapp, sehingga jangkauan penyebarannya juga makin meluas.

Jika sudah dicari, dipilih, dan difilter sesuai dengan parameter yang ditentukan maka bisa membagikan instrumen penelitian yang digunakan kepada sampel yang terpilih.

Penelitian kali ini adalah menggunakan kuisioner yang disebar secara online dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi di masa pandemi yang belum sepenuhnya reda ini. Sehingga sampel yang didapatkan sudah sesuai dengan parameter yang ditentukan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

1.8.5 Variabel Penelitian / Instrumen Penelitian

Pada konteks penelitian kali ini adalah kuantitatif deskriptif, dimana tujuannya tidak hendak menguji hubungan, melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang telah diolah secara statistik. Penelitian deskriptif ini menggunakan dua variabel yakni variabel figuritas tokoh Tri Rismaharini dan variabel pemahaman pemilih akan kapabilitas pasangan Eri-Armuji, kegunaannya untuk mengungkap dan menggambarkan preferensi politik pemilih pasangan Eri-Armuji dilihat dari dua pendekatan dan untuk mengungkap tingkatannya. Instrumen berbentuk kuisioner yang sudah disusun berdasarkan teori perilaku memilih,

spesifiknya pada pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Kuisoner akan diisi oleh responden dengan pernyataan berbentuk skala likert, yakni sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1) yang nantinya akan diolah menjadi total skor. Pemilih dalam menjawab instrumen penelitian atau kuisoner yang dibagikan dapat diketahui dan diukur sikap atau pendapatnya, karena menunjukkan tingkat persetujuan pemilih dalam konteks preferensi politiknya memilih pasangan Eri-Armuji.

Table 1. 1 Penjabaran Instrumen Penelitian

Preferensi Politik	Instrumen	Indikator	Item
Pendekatan Psikologis (Figuritas Tokoh)	1. Pernyataan soal penilaian atau kepuasan akan kinerja Risma	Kinerja Risma	1
	2. Pernyataan soal menyenangkan Risma	Relasi Pemilih dengan Risma	2,3
	3. Pernyataan soal mengagumi Risma		
	4. Pernyataan soal alasan memilih karena partai sama 5. Pernyataan soal alasan memilih karena dukungan Risma 6. Pernyataan soal alasan memilih karena pengaruh Risma	Relasi Risma dengan Pasangan Eri-Armuji	4,5,6
Pendekatan Rasional (Pemahaman Kapabilitas Calon)	1. Pernyataan soal pengetahuan pemilih	Pengetahuan Pemilih	1
	2. Pernyataan soal alasan memilih karena modal Eri	Background Pasangan Eri-Armuji	2,3,4

	3. Pernyataan soal alasan memilih karena modal Armuji		
	4. Pernyataan soal penegasan alasan memilih		
	5. Pernyataan soal harapan pemilih	Efikasi Politik Pemilih	5

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terbagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah dengan melakukan pengumpulan data yang sifatnya sekunder yaitu berupa studi pustaka, berkenaan dengan literatur terkait yang relevan seperti penelitian terdahulu yang serupa dan relevan dengan topik penulis yaitu berkenaan dengan perilaku memilih yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan referensi. Dalam hal ini juga mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan data dan kegiatan Pemilihan Umum di Kota Surabaya yang dibutuhkan dalam konteks penelitian kali ini.

Kemudian di tahapan kedua, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner (angket) yang dilakukan dengan membagikan seperangkat pertanyaan kepada responden atau sampel yang terpilih dalam bentuk kuissoner online, dikarenakan masih ada pandemi COVID-19 maka meminimalisir tatap muka secara langsung yaitu menggunakan media online serta membuat penelitian menjadi efektif dan efisien, dengan tetap mencari responden sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang sudah ditentukan.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah aktivitas yang dilakukan pasca data dari seluruh responden sudah terkumpul (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, spesifiknya adalah menggunakan statistik deskriptif, semestanya adalah dimulai dari pengelompokan atau klasifikasi data dengan jenis responden dan variabel tertentu (distribusi frekuensi), menggambarkan

karakteristik variabel dengan lebih terukur, interpretasi atau pemaknaan data, serta untuk mengetahui tingkatan yang sedang dicari menggunakan pengkategorian sesuai rumus yang dengan mengetahui nilai skornya, mean hitungnya, dan standar deviasi hitungnya.

Table 1. 2 Rumus Kategori Rentangan Norma Penilaian

Kategori Tinggi	$X \geq \text{Mean} + \text{SD}$
Kategori Sedang	$\text{Mean} - \text{SD} \leq X < \text{Mean} + \text{SD}$
Kategori Rendah	$X < \text{Mean} - \text{SD}$

Kategorisasi (Azwar, 2012)